

**PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP  
KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRI  
TAHUN AJARAN 2018/2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Oleh:**

**LUTHFI NUR HANIFAH**

**A210150011**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM  
ZONASI SEKOLAH DALAMPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI  
TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRI  
TAHUN AJARAN 2018/2019**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**LUTHFI NUR HANIFAH**

**A210150011**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Tri Nur Wahyudi, S.Pd., MM**

**NIDN. 06-0301-7504**

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM  
ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI  
TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRI  
TAHUN AJARAN 2018/2019

Oleh:

**LUTHFI NUR HANIFAH**

A210150011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
pada hari Selasa, 29 Oktober 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Tri Nur Wahyudi, S.Pd., MM  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Harsono, SU  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Suranto, S.Pd., M.Pd  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,



**Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum**

NIP. 19650428 199303 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2019

Penulis



**Luthfi Nur Hanifah**

**NIM. A210150011**

**PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM  
ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRI TAHUN AJARAN  
2018/2019**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Tanggapan orangtua murid tentang kebijakan sistem zonasi sekolah menjadi nilai yang efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dampak yang timbul dari penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah diantaranya adalah jarak rumah yang dekat dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos, menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Usulan orangtua murid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkan pemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.

**Kata kunci:** Persepsi orangtua, kebijakan sistem zonasi sekolah

**Abstract**

This study aims to determine the perceptions of parents of school zoning system policies in the acceptance of new students at the State High School level in the Wonogiri Region 2018/2019 Academic Year. This research is a qualitative research with ethnographic design. Data collection techniques using interviews and observation. To maintain the validity of the data using triangulation techniques. The result of this study indicate that government socialization about school zoning system policies are still many parents who do not understand about the school zoning system policies. Parent's responses to school zoning policies are an effective value for evaluating a policy implemented by the government. Impacts arising from the implementation of the school zoning system policy include the distance of the house close to the school directly accepted, parents do not need to find a boarding house, save on transportations costs, parents can monitor children's relationships, train children to be independent and confident, and with the system zoning school children cannot freely choose the school they want. The parent's proposal for the adoption of a school zoning system policy is expected. The government does not restrict children from choosing schools.

**Keywords:** Parental perception, School zoning System Policy

## 1. PENDAHULUAN

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial (sosial inklusif), ekonomi dan lingkungan hidup.

Pendidikan berkualitas dalam SDGs selaras juga dengan salah satu program Nawacita yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”. Namun, pada kenyataannya kesenjangan mutu pendidikan yang menjadi banyak kendala di berbagai negara termasuk negara Indonesia, ini yang dikatakan oleh Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dan The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring (GEM) Report* tahun 2016 di Jakarta (Suastha, 2016).

Upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017. PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada pelaksanaannya, PPDB dengan sistem zonasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat khususnya para orangtua murid, seperti yang dilansir dari laman media *online* (Ahsan Ridhoni, 2017).

Penelitian oleh (Badau & Yahya, 2017) ini menilai keberhasilan sistem zonasi klaster Sekolah Menengah Atas di Negara Adamawa. Sistem klaster

adalah salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah negara bagian Nigeria di Nigeria 1991. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan ekonomi, pedagogik, administratif dan politik dari zonasi klaster sistem di Sekolah Menengah Atas di negara Adamawa.

Berdasarkan temuan pada tanggal 31 Juli 2017 dalam press rilisnya menjabarkan mengenai hasil temuan selama pemantauan terkait PPDB sistem *real time online* dan sistem zonasi (Ombudsman RI, 2017) di wilayah Wonogiri juga mengalami beberapa masalah terkait dengan PPDB dengan sistem zonasi sekolah. Terutama pada pro-kontra orangtua murid yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan sistem zonasi sekolah ini. Tidak adanya sosialisasi pada masyarakat di wilayah Wonogiri terkait sistem zonasi sekolah ini membuat para orangtua murid merasa kebingungan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah yang timbul. Tidak hanya dari kalangan orangtua murid tetapi dari pihak sekolah juga mengalami permasalahan. Menurut Walgito “persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris.” Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi (Walgito, 2010).

Salah satu upaya nyata dari pemerintah dalam pemerataan pendidikan adalah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan calon peserta didik melalui permendikbud. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan aturan baru tersebut di Wonogiri juga menerapkan sistem zonasi sekolah, tetapi sistem zonasi sekolah di Wonogiri berbeda dengan daerah lainnya. Murid yang berada dalam zonasi rumah tangga wajib diterima di sekolah yang masih berada di satu RT tanpa mempertimbangkan nilai dari peserta didik.

Kebijakan sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Wonogiri ini menimbulkan prokontra dikalangan orangtua calon peserta didik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa adanya sosialisasi dan begitu cepat kebijakan dikeluarkan. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk pemeratakan kualitas pendidikan, tetapi para orangtua malah sulit untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang memiliki kualitas lebih tinggi dari sekolah lainnya. Diterapkannya kebijakan sistem zonasi sekolah muncul berbagai persepsi dari para orangtua peserta didik.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara mempertemukan tiga sumber informasi atau lebih untuk menentukan suatu informasi itu valid atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnograf. Menurut Harsono (2016: 31) “Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup.”

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018 sampai selesai. Tempat penelitian ini dilakukan pada tujuh sekolah dari 13 SMA negeri di wilayah Wonogiri.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2009) ada beberapa langkah-langkah Teknik Analisis Data Interaktif, meliputi: *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Confusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan), yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data hasil wawancara dilengkapi dengan dokumentasi berupa rekaman wawancara dan foto. Observasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian diuraikan secara relevan dengan rumusan masalah dan berdasarkan pada fokus pertanyaan penelitian tentang persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019 sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019**

Dalam sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri wilayah Wonogiri tidak ada sosialisasi yang merata ke masyarakat, dan masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Sosialisasi itu sangat penting dilakukan agar masyarakat paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Topo & Zulfa, 2001), bahwa sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab hal itu dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sosialisasi kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang tidak mendapatkan sosialisasi dan belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Sosialisasi itu sangat penting dilakukan agar masyarakat paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan.

#### **b. Tanggapan orangtua murid tentang kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB di tingkat SMA negeri di wilayah wonogiri tahun ajaran 2018/2019**

Tanggapan orangtua terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah di wilayah Wonogiri zonasi sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pendaftaran siswa baru dengan syarat berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Syarat diterimanya calon peserta didik berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah sangat ditekankan guna meratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak ada lagi sekolah favorit. Hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2018 pasal 2 bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Kebijakan sistem zonasi sekolah kurang adil karena yang menjadi patokan adalah jarak, sedangkan nilai tidak dipertimbangkan. Kebijakan sistem zonasi sekolah perlu dikaji ulang karena kurang adanya sosialisasi pada orangtua murid. Anak memiliki hak untuk memilih sekolah sesuai keinginannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andina (2017).

Berdasarkan realita dan teori, tanggapan orang tua murid menjadi nilai yang efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Karena orang tua murid merupakan komponen masyarakat yang menjadi obyek penerapan kebijakan sistem zonasi. Namun tanggapan orangtua murid juga harus diimbangi dengan usulan yang membangun agar pelaksanaan sistem zonasi sekolah dapat berjalan lebih baik. Orang tua murid yang memiliki anak SMA yang sekolah di SMA negeri di Wonogiri selain memberikan tanggapan juga memberikan usulan untuk perbaikan penerapan sistem zonasi.

**c. Dampak penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dampak positif dari penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri, sebagai berikut;

- 1) Aturan jarak rumah dengan sekolah yang paling dekat langsung diterima, ini berlaku untuk zona satu.

- 2) Orangtua murid tidak repot mencarikan kos anaknya serta menghemat biaya transportasi.
- 3) Orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak.
- 4) Sistem zonasi dapat melatih anak mandiri dan memiliki rasa percaya diri karena ketatnya persaingan untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.
- 5) Kemudahan didapatkan oleh orangtua murid yang berprofesi sebagai guru SMA negeri di Wonogiri, anaknya langsung diterima karena menggunakan surat keterangan anak guru.
- 6) Adanya jalur prestasi akan memudahkan diterima di sekolah dengan melampirkan piagam prestasi yang dimiliki calon peserta didik.

Kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru sejatinya memiliki dampak yang positif seperti yang dikatakan Desi Wulandari, dkk (2017).

Sistem zonasi sekolah sudah banyak menimbulkan dampak negatif menurut persepsi orangtua murid. Dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan, karena ada aturan zonasi yang harus ditaati.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang dampak penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri adalah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan, karena ada aturan zonasi yang harus ditaati.

**d. Usulan orangtua murid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB di tingkat SMA di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019**

Sebagai obyek penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah orangtua murid berusaha memenuhi persyaratan yang diatur dalam sistem zonasi sekolah. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan orangtua murid tentang usulan penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri, sebagai berikut;

- 1) Orangtua mengharapkan sebaiknya pemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah. Karena bisa mengakibatkan semangat anak surut ketika tidak bersekolah di sekolahan pilihannya
- 2) Ketentuan jarak yang ditetapkan sebaiknya lebih luas dengan penyaringan siswa lebih selektif lagi, agar siswa yang memiliki kemampuan akademik baik terwadahi di sekolah yang diinginkan.
- 3) Sosialisasi sangat penting dilakukan agar para orangtua dan calon peserta didik paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Supaya ada persiapan dalam memenuhi persyaratan yang akan dipenuhi oleh orangtua dan calon peserta didik.
- 4) Tujuan dari kebijakan sistem zonasi sekolah adalah pemeratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah belum mampu. Seharusnya pemerintah memberikan fasilitas yang mewadahi untuk mencapai tujuan tersebut. Terutama di daerah pedesaan dan perbatasan.

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini diantaranya, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik. UU ini merupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Artinya usulan-usulan dari orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sistem zonasi sekolah.

#### 4. PENUTUP

Kebijakan sistem zonasi sekolah kurang adil karena yang menjadi patokan adalah jarak, sedangkan nilai tidak dipertimbangkan. Kebijakan sistem zonasi sekolah perlu dikaji ulang karena kurang adanya sosialisasi pada orangtua murid dan masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Dampak yang timbul dari penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah diantaranya adalah jarak rumah yang dekat dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos, menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Usulan orangtua murid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkan pemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh implikasi yang berhubungan dengan persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah harus dijadikan sebagai alat evaluasi penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga saat penerapan kebijakan pemerintah tidak banyak menimbulkan masalah. Pemerintah seharusnya dalam bersosialisasi tentang kebijakan sistem zonasi sekolah lebih merata dan dengan bernagai macam media, seperti iklan di televisi, sosial media, *website* pemerintah, dan kabar berita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *UM Surabaya*.
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, IX(14), 9–12. Retrieved from [www.puslit.dpr.go.id](http://www.puslit.dpr.go.id)
- Badau, K. M., & Yahya, S. A. (2017). Assessing the Success of School Cluster Zoning System in Senior Secondary Schools of Adamawa State, Nigeria. *The Journal of Middle East and North Africa Sciences*, 3(4), 1–7.

<https://doi.org/10.12816/0036065>

- Danarjati, D. P., Murtiadi, & Ekawati, A. R. (2013). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harsono. (2016). *Etnografi Pendidikan: Suatu Desain Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Jasmine.
- Mandic, S., Sandretto, S., Bengoechea, E. G., Hopkins, D., Moore, A., Rodda, J., & Wilson, G. (2017). *Enrolling in the Closest School or Not*.
- Ombudsman RI. (2017). Berita - Ombudsman RI. Retrieved October 27, 2019, from <https://www.ombudsman.go.id/news/r/praktek-maladministrasi-yang-terus-berulang-dalam-penyelenggaraan-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017>
- Ridhoni, A. M. (2017). Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru - Tirta.ID. Retrieved October 27, 2019.
- Suastha, R. (2016). UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Topo, S., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 5